PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN KLASIFIKASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN WONOSOBO

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Fitri Andriani Setyowati
NIM 7101415259

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 04 Maret 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi	Pembimbing
Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.	Inaya Sari Melati, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198201302009121005	NIP. 198912182015042003

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Maret 2019

Penguji I

Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd.
NIP. 196701061991031003

Penguji II

Indri Murniawaty, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198005182015042001

Penguji III

Inaya Sari Melati, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198912182015042003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Heri Yanto MBA, PhD.
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fitri Andriani Setyowati
NIM	: 7101415259
Tempat Tanggal Lahir	: Blora, 13 Februari 1997
Alamat	: Jalan Cendana Gg 06 Beran, RT 03 RW 02 Kecamatan Blora Kabupaten Blora

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 4 Maret 2019

Fitri Andriani Setyowati
NIM. 7101415259

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Jika kamu merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah lelahmu tak sebanding dengan lelah kedua orang tuamu (Fitri Andriani Setyowati).

Persembahan

Karya ini kupersembahkan untuk :

Bapak Sutadi, Ibu Parsini, dan Adik Astri Andriana Kurniawati tersayang. Terima kasih senantiasa memberi semangat, dukungan, motivasi, dan nasihat selama ini.

Teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan dorongan selama ini.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dasar dan Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo". Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan tuntunan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto MBA, PhD. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Inaya Sari Melati, S.Pd., M.Pd. Dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh ketelitian dan kesabaran serta memberikan saran dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi.

5. Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. Dosen penguji pertama yang telah memberikan kritik dan saran untuk skripsi ini sehingga menjadi lebih baik.
6. Indri Murniawaty, S.Pd., M.Pd. Dosen penguji kedua yang telah memberikan kritik dan saran untuk skripsi ini sehingga menjadi lebih baik.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang terima kasih atas kebaikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
8. Bapak, Ibu, Adik, dan Teman tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan baik secara materiel maupun non materiel sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Skripsi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, jika ada kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan skripsi ini, penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya.

Semarang, 4 Maret 2019

Penyusun

SARI

Setyowati, Fitri Andriani. 2019. "*Pengaruh Tingkat Pendidikan Dasar dan Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo"*. Skripsi. Pendidikan Ekonomi Koperasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Inaya Sari Melati, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci : Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan Dasar, Tingkat Pengangguran Terbuka

Kemiskinan merupakan salah satu masalah di dalam bidang perekonomian yang selalu muncul di dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian yang serius mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia yaitu diatas 10% pada tahun 2017. Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 55,73%. Kemiskinan di Pulau Jawa masih tergolong tinggi yaitu di atas 10% yang pertama terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diikuti Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten tergolong rendah di bawah 10%. Kabupaten Wonosobo sebagai predikat kabupaten termiskin di Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin sebesar 20,32%, persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 20,03% yang merupakan kabupaten termiskin di Provinsi DIY.

Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Wonosobo diantaranya pendidikan, pengangguran, dan letak wilayah perkotaan dan perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dasar dan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan klasifikasi perkotaan dan perdesaan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik secara nasional maupun di Kabupaten Wonosobo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, serta Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. Metode analisis yaitu deskriptif dan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor tersebut menggunakan data *cross section* dengan EViews 9.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pendidikan, pendidikan di perdesaan, serta pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan pendidikan di perkotaan, pengangguran di perkotaan dan pengangguran di perdesaan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diharapkan pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan permasalahan di bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin dan pengangguran dengan menambah lapangan pekerjaan per kecamatan di Kabupaten Wonosobo supaya dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi.

ABSTRACT

Setyowati, Fitri Andriani. 2019. *"The Effect of Basic Education Level and Unemployment Level Based on The Classification of Urban and Rural Areas on The Level of Poverty in Wonosobo Regency"*. Final Project. Economic Education of Cooperative. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor: Inaya Sari Melati, S.Pd., M.Pd.

Keywords : Basic Education Level, Poverty Level, Unemployment Level

Poverty is one of the issues in the field of economy which always arises in the life of society. The problem of poverty in Indonesia is still a serious concern given the still high level of poverty in several provinces in Indonesia, which is above 10% in 2017. The percentage of poor people in Indonesia is concentrated in Java at 55.73%. Poverty in Java is still high, which is above the first 10% in the Special Province of Yogyakarta, followed by Central Java and East Java Provinces. Mean the Province of West Java, DKI Jakarta Province, and Banten Province are classified as low below 10%. Wonosobo Regency as the poorest district in Central Java with a percentage of poor population of 20.32%, this percentage is higher than the percentage of poor people in Kulon Progo Regency, which is 20.03%, which is the poorest district in DIY Province.

Many factors influence poverty in Wonosobo Regency including education, unemployment, and the location of urban and rural areas. This study aims to determine the effect of basic education level and unemployment level based on the classification of urban and rural areas on the level of poverty in Wonosobo Regency. The data used in this study were secondary data obtained from the BPS both nationally and Wonosobo District, Wonosobo Regency Youth and Sports Education Office, and the Department of Manpower, Industry, Transmigration, Wonosobo Regency. The analytical methods were descriptive and quantitative. The analysis tool used to analyze the influence of these factors using cross section data with EViews 9.

Based on the results of data analysis shows that education, rural education, and unemployment affect the poverty rate in Wonosobo Regency. Mean urban education, unemployment in urban areas and unemployment in rural areas do not affect the level of poverty in Wonosobo District.

Based on the results of this research, it is expected that the regional government can pay more attention to the problems in education which give scholarship to poor society and unemployement which open job vacancy field all of subdistrict in Wonosobo Regency in order to reduce the level of poverty that occurs.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN KELULUSAN ..... **iii**

PERNYATAAN ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

PRAKATA ..... **vi**

SARI ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 7
1.3. Cakupan Masalah 8
1.4. Rumusan Masalah 8
1.5. Tujuan Penelitian 9
1.6. Kegunaan Penelitian 10
1.7. Orisinalitas Penelitian 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN **13**

2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*) 13
2.2. Kajian Variabel Penelitian 16
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu 33
2.4. Kerangka Berpikir 39
2.5. Hipotesis Penelitian 42

BAB III METODE PENELITIAN 44

3.1. Jenis dan Desain Penelitian..... 44
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel..... 45
3.3. Variabel Penelitian yang Dirumuskan Secara Operasional 45
3.4. Instrumen Penelitian 47
3.5. Teknik Pengumpulan Data..... 47
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 55

4.1 Gambaran Umum..... 55
4.2. Analisis Data Penelitian..... 56
4.2.1. Analisis Deskriptif 56
4.2.1.4.Hasil Analisis Regresi..... 60
4.3. Uji Prasyarat Analisis 61
4.3.1. Uji Normalitas..... 61
4.3.2. Uji Linieritas 62
4.4. Uji Asumsi Klasik..... 62
4.4.1. Uji Multikoliniearitas..... 62
4.4.2. Uji Heteroskedastisitas..... 64
4.4.3. Uji Autokorelasi..... 65
4.5. Pengujian Hipotesis 65
4.5.1. Uji t.....65
4.5.2. Uji F.....70
4.5.3. Koefisien Determinasi (R2) 71
4.6. Pembahasan..... 71

BAB V PENUTUP..... 82

5.1. Kesimpulan 82
5.2. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA..... 86

LAMPIRAN..... 90

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kajian Penelitian Terdahulu…….33

Tabel 4.1. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Wonosobo, 2017..……..57

Tabel 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo……..58

Tabel 4.3. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, 2017……..59

Tabel 4.4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda……..60

Tabel 4.5. Uji Linearitas……..……..62

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas……63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2017……3

Gambar 1.2. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 2017……..4

Gambar 1.3. Persentase Tamat Pendidikan Dasar…….5

Gambar 1.4. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka……..6

Gambar 2.1. Komponen-Komponen *Human Capital*…….14

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir……..42

Gambar 4.1. Uji Normalitas……...…….61

Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas……...……....64

Gambar 4.3. Hasil Analisis Data……70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017……91

Lampiran 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017……...92

Lampiran 3. Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan……..93

Lampiran 4. Hasil Estimasi OLS……94

Lampiran 5. Uji Normalitas……95

Lampiran 6. Uji Liniearitas……....95

Lampiran 7. Uji Multikolinieritas……...95

Lampiran 8. Uji Heteroskedastisitas……...96

Lampiran 9. Surat Ijin Observasi……97

Lampiran 10. Surat Ijin Penelitian……98

Lampiran 11. Transkip Wawancara……105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu negara di belahan dunia manapun. Kemiskinan bahkan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah negara dari waktu ke waktu, terlebih pada negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kategori berkembang menyadari pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menekankan dalam agenda tahunan pemerintah. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian kebijakan pemerintahan Indonesia dengan memperhatikan pembangunan nasional, indikator yang digunakan yaitu mengurangi angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan rumit yang tidak memiliki ujung pangkal. Hal itu dikarenakan, banyak faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah kemiskinan, begitu juga kemiskinan dapat memunculkan masalah ekonomi pembangunan lainnya. Oleh karenanya, persoalan kemiskinan sering disebut dengan istilah lingkaran setan yang tidak berujung pangkal.

Kemiskinan digambarkan memiliki banyak dimensi dan definisi. Umumnya dimensi yang sering digunakan sebagai dimensi penilaian adalah dari dimensi ekonomi. Standar yang digunakan dalam penilaian kriteria kemiskinan umumnya oleh BPS maupun *World Bank* sama-sama menyoroti dari keadaan

penduduk yang kehidupannya berada di bawah rata-rata. Kehidupan dibawah rata-rata dapat ditunjukkan dalam bentuk rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, akses terhadap sanitasi air bersih, keamanan, dan sebagainya.

Menurut para ahli ekonomi, kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensial (Arsyad, 2010: 299). Kemiskinan yang bersifat multidimensial dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan, dan informasi. Dilain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Wijayanti, 2005: 215).

Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa pada tahun 2017 sebesar 55,73%. Total penduduk miskin di Pulau Jawa tersebut terbagi-bagi menjadi 6 provinsi, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 13,02%, diikuti oleh Jawa Tengah 13,01%, Jawa Timur 11,77%, Jawa Barat 8,71, DKI Jakarta 3,77%, dan Banten 5,45%. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan persentase tingkat

kemiskinan absolut paling tinggi kedua setelah DIY dengan selisih 0,1% yang berada pada level 13,01% dimana hal tersebut masih tergolong *Hard Core Poverty* (>10%) dalam artian tingkat kemiskinan masih berada pada level yang tinggi (Gambar 1.1.).

Gambar 1.1. Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa, 2017

Sumber : Diolah dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017

Berdasarkan publikasi BPS, hampir sekitar 50% kabupaten/kota di Jawa Tengah masih memiliki tingkat kemiskinan absolute > 10%. Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/kota dengan Kabupaten Wonosobo sebagai predikat kabupaten termiskin di Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin sebesar 20,32%, persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 20,03% yang merupakan kabupaten termiskin di DIY serta kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,62% (Gambar 1.2.).

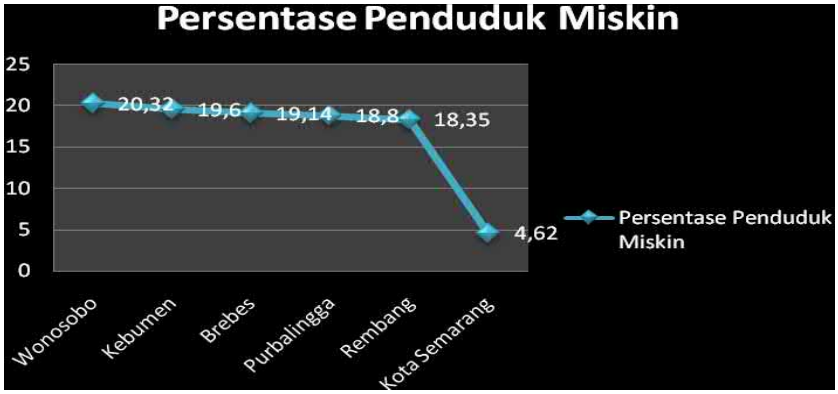

Gambar 1.2. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah, 2017

Sumber : Diolah dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, 2017

Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Rejekiningsih (2013: 12) menunjukkan hasil regresi variabel pendidikan menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2012 : 167) menunjukkan hasil regresi variabel pendidikan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di KTI. Jika dikaitkan dengan teori lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse (1953) menggambarkan bahwa keterbelakangan dan ketertinggalan merupakan suatu hal yang harus diputus mata rantainya guna mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Keterbelakangan dan ketertinggalan dapat diatasi dengan adanya pendidikan yang diselenggarakan oleh negara untuk warga negaranya guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat mengurangi tingkat keterbelakangan dan ketertinggalan suatu daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayo (2000: 521) *terkait the role of employee development in the growth of intellectual capital* yang

menjelaskan bahwa modal manusia merupakan pendorong utama dalam pertumbuhan sebuah perusahaan. Sebagian besar perusahaan telah mengetahui secara intuitif bahwa masa depan perusahaan terletak pada kekuatan sumber daya intelektual karyawan, sehingga perusahaan akan berupaya mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

Pendidikan merupakan *human capital investment* karena pada dasarnya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dapat digolongkan sebagai investasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang. Penggunaan persentase rasio penduduk usia 10 tahun ke atas yang telah tamat pendidikan SD dan SMP dirasa cukup mewakili pendidikan itu sendiri. Pada tingkat pendidikan SD dan SMP seseorang telah memiliki pengetahuan dan keahlian dasar untuk menghindari mereka dari keterbelakangan dan kebodohan (Wahyudi dan Rejekiningsih, 2013; 8).

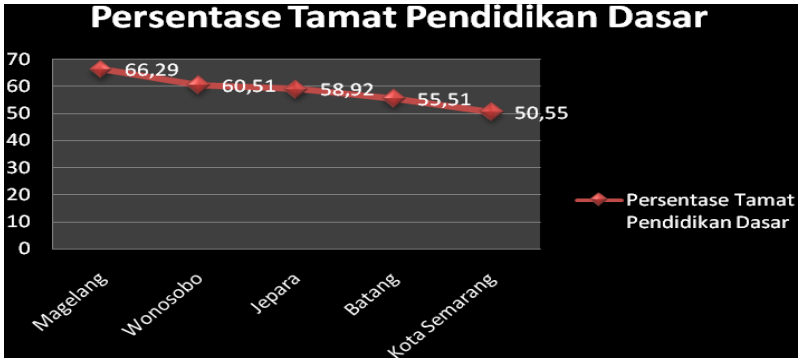

Gambar 1.3. Persentase Tamat Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Sumber : Diolah dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, 2017

Akar permasalahan lainnya yang terkait dengan jumlah penduduk miskin yaitu pengangguran. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2013: 355). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2012: 167) menunjukkan hasil regresi variabel pengangguran menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di KTI. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Rejekiningsih (2013: 13) menunjukkan hasil regresi variabel pengangguran menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Jika dikaitkan dengan teori lingkaran setan versi Nurkse (1953) produktivitas sebagai salah satu sebab kemiskinan. Pengangguran diartikan sebagai tingkat produktivitas seseorang yang rendah. Hal ini karena penganggur tidak memiliki suatu pekerjaan untuk menghasilkan upah ataupun gaji. Padahal sebagian besar rumah tangga bergantung dari gaji/ upah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengangguran lebih sering terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga mereka harus hidup dibawah garis kemiskinan.

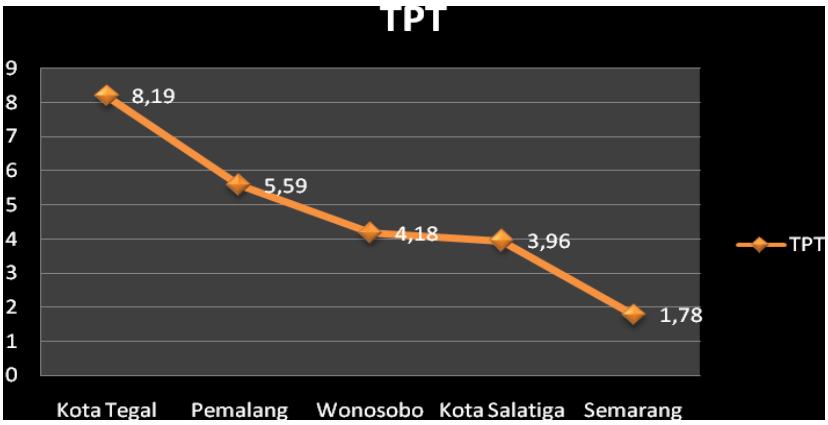

Gambar 1.4. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten Wonosobo mendapatkan predikat sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Apabila dilihat dari faktor tingkat pendidikan dasar dan tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Wonosobo berada pada kategori tinggi (Gambar 1.3.) dan tingkat pengangguran terbuka berada pada kategori sedang (Gambar 1.4.) tetapi hal tersebut tidak mengubah predikat Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dari segi Pengaruh Tingkat Pendidikan Dasar dan Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang muncul pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 sebesar 60,51%, data tersebut menunjukkan bahwa faktor tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Wonosobo berada pada ketegori tinggi.
2. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 mencapai 4,18%, data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo berada pada ketegori sedang di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo merupakan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah yaitu mencapai 20,32%.

1.3. Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ditemukan, maka penelitian terkait kemiskinan ini dibatasi pada faktor tingkat pendidikan dasar dan tingkat pengangguran terbuka serta pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti agar lebih fokus dan mendalam. Selain itu, penelitian ini dilakukan lebih lanjut mengenai tingkat pendidikan dasar dan tingkat pengangguran terbuka dengan dibedakan melalui klasifikasi perkotaan dan perdesaan yang terbagi dalam 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah dan sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perkotaan di Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perdesaan di Kabupaten Wonosobo?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo?
5. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo?

6. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo?
7. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo?
8. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo?
9. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo?
10. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan dasar di perkotaan, tingkat pendidikan dasar di perdesaan, tingkat pengangguran, tingkat pengangguran di perkotaan, dan tingkat pengangguran dasar di perdesaan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo.
2. Mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perkotaan di Kabupaten Wonosobo.
3. Mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat pengangguran terbuka di perdesaan di Kabupaten Wonosobo.

4. Mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
5. Mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
6. Mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
7. Mendeskripsikan pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
8. Mendeskripsikan pengaruh tingkat pengangguran terbuka di perkotaan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
9. Mendeskripsikan pengaruh tingkat pengangguran terbuka di perdesaan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
10. Mendeskripsikan pengaruh tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan dasar di perkotaan, tingkat pendidikan dasar di perdesaan, tingkat pengangguran, tingkat pengangguran di perkotaan, dan tingkat pengangguran dasar di perdesaan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

1.6. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan masukan bagi para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lain yang sejenis.

b. Menambah bahan pustaka Program Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, FE Universitas Negeri Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan untuk memperoleh gambaran mengenai pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan serta melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

b. Sebagai tambahan referensi bagi pemerintah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sehingga dapat menetapkan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan publik untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merujuk pada penelitian Wahyudi dan Rejekiningsih (2013) yang berjudul Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. Variabel bebas yang digunakan yaitu pendidikan, kesehatan, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan teknik pengambilan data secara *time series* selama 4 tahun yaitu tahun 2007-2010 dan data *cross section* terhadap 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu terletak pada unit analisis, yakni persentase tingkat kemiskinan seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo, serta

terdapat variabel dummy sebagai slope yaitu variabel yang menempel dalam variabel independen. Variabel dummy yang digunakan yaitu perkotaan dan perdesaan. Penggunaan variabel dummy wilayah dalam penelitian ini disebabkan karena kemiskinan di negara berkembang juga dipengaruhi oleh letak wilayah, penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan akan mudah mendapatkan fasilitas-fasilitas kesejahteraan sedangkan penduduk yang tinggal di daerah pelosok akan sulit menjangkau fasilitas-fasilitas kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah di Kabupaten Wonosobo yang terletak di daerah pegunungan, sehingga menyebabkan jarak antar daerah-daerah saling berjauhan dan sulit mendapatkan fasilitas-fasilitas kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, dengan teknik pengambilan data secara *cross section* terhadap 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1. Teori *Human Capital*

Human Capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Pembentukan nilai tambah yang dikontribusikan oleh *human capital* dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya akan memberikan *sustainable revenue* di masa akan datang bagi suatu organisasi (Malhotra 2003 dan Bontis dalam Rackhmawati, dkk 2008: 13).

Human capital merupakan nilai tambah bagi perusahaan dalam perusahaan setiap hari, melalui motivasi, komitmen, kompensasi, serta efektivitas kerja tim, nilai tambah yang dapat dikontribusikan oleh pekerja berupa: pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, pemindahan pengetahuan dari pekerja serta perubahan budaya manajemen (Mayo, 2000: 526).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *human capital* merupakan segala sesuatu mengenai manusia dengan segala kapasitas yang dimilikinya untuk terus dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan menciptakan nilai tambah dalam diri individu.

Komponen Human Capital

Menurut Andrew Mayo (2000: 526-530), *human capital* memiliki lima komponen yang memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan *human*

capital perusahaan yang pada akhirnya menentukan nilai sebuah perusahaa. Kelima nilai *human capital* tersebut adalah *individual capability, individual motivation, the organization climate, workgroup effectiveness dan leadership*.

1. *Individual Capability*

Menurut Mayo (2000) *individual capability* memiliki lima kriteria, yaitu: 1) *personal capabilities*, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dari dalam dirinya sendiri, meliputi penampilan, pikiran, tindakan, dan perasaan, 2) *prefesional and technical know-how* yaitu kemampuan untuk bersikap profesional dalam setiap situasi dan kondisi serta adanya kemauan untuk melakukan transfer *knowledge* dari yang senior ke junior, 3) *experience,* yaitu seseorang yang berkompeten dan memiliki pengalaman yang cukup lama di bidangnya serta memiliki sikap terbuka terhadap pengalaman, 4) *the network and range of personal contacts*, yaitu seseorang dikatakan berkompeten apabila memiliki jaringan atau koneksi yang luas dengan siapa saja terutama pada orang-orang yang berhubungan dengan profesinya, 5) *the value and attitudes that influence actions*, yaitu nilai dan sikap akan mempengaruhi tindakannya di dalam lingkungan kerja seperti memiliki kestabilan emosi, ramah, dapat bersosialisasi, dan tegas.

2. *Individual Motivation*

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) karyawan dalam menghadapi situasi kerja perusahaan. Sikap mental karyawan yang positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja yang maksimal.

3. *The Organization Climate*

Budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi.

4. *Workgroup Effectiveness*

Efektivitas tim kerja di dasarkan pada dua hasil-hasil produktif dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaan serta komitmen mereka. Hasil produktif berkenaan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja.

5. Leadership

Karakteristik seorang pemimpin di dasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) seseorang yang belajar seumur hidup, 2) berorientasi pada pelayanan, 3) membawa energi yang positif.

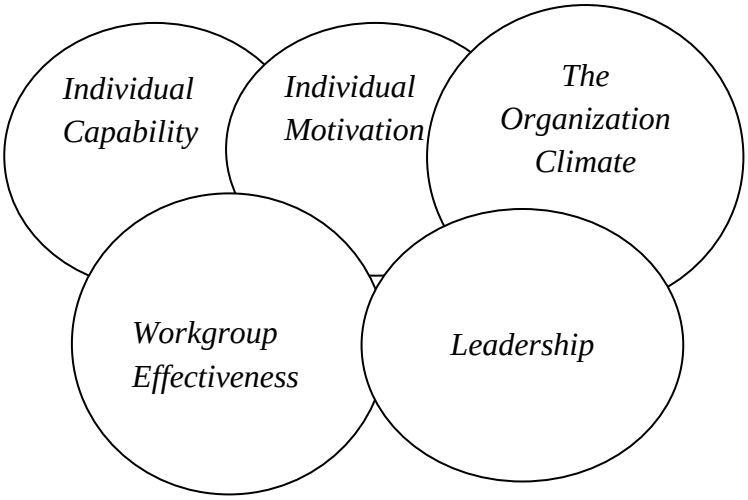

Gambar 2.1. Komponen-Komponen *Human Capital*

Sumber : Diolah dari Mayo (2000)

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Kemiskinan

2.2.1.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan yang menjadi suatu masalah di beberapa negara berkembang merupakan gambaran dari kondisi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar yang berlaku. Berbagai teori muncul untuk menegaskan penjelasan tentang kemiskinan.

Kuncoro (2006: 112) menyatakan kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BAPPENAS) mendefinisikan kemiskinan berdasarkan pendekatan keluarga, yaitu membagi kriteria keluarga dalam lima tahapan : keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III plus). Keluarga sejahtera I adalah kelompok orang yang termasuk dalam klasifikasi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*). Klasifikasi keluarga sejahtera II yaitu kemampuan kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan psikologi (*psycological needs*), dan klasifikasi keluarga sejahtera III adalah kemampuan kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pengembangan (*developmental needs*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok

orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang dimaksud miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar (Rumahorbo, 2014 :10).

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi (Suryawati, 2005: 122).

1) Kemiskinan (*Proper*)

   Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2) Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*sosial power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4) Ketergantungan (*Dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tersebut menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5) Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksud oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Pendekatan ini dihitung menggunakan *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Jadi dalam pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

2.2.1.2. Penyebab Kemiskinan

Sharp, et. Al (1996) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi (Kuncoro, 2006: 120). Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang

beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang dikategorikan miskin, namun *World Bank* (2006: 11) menyebutkan ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu :

1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti : makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan.
2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat.
3. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulanginya.

Suryawati (2005: 123) mengutip pendapat Nasikun yang menyebutkan beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan kemiskinan.
2. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deret hitung.

4. *Resources management and the environment*, adalah unsur manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
5. *Natural cycle and processes*, kemiskinan dapat terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus menerus.
6. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
7. *Cultural and ethnic factor*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
8. *Exploratif intermediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
9. *Internal political fragmentation and civil strafe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fregmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. *International processes*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

2.2.1.3. Ukuran Kemiskinan

Badan Pusat Statistik dalam menghitung angka kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Komponen kebutuhan dasar yang digunakan BPS ini terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan yang diambil berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, kemiskinan di pandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran inilah disebut sebagai Garis Kemiskinan. Maka dapat diartikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Ukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik terdiri atas tiga kategori indeks, yaitu :

1. Indeks kemiskinan atau presentase penduduk miskin (*Head Count Index* atau P_0) merupakan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Demikian juga sebaliknya, bila angka P0 besar maka menunjukkan tingginya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. Indeks Kedalam Kemiskinan (*Poverty Gap Index* atau P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan jurang (*gap*) antara

pendapatan rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi angka ini maka semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* atau P_2) indeks ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin dan memperlihatkan sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini berguna untuk perumusan kebijakan yang berfokus mengurangi kemiskinan ultra atau ekstrim.

2.2.1.4. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensial, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2005: 122) :

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan

kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal sebagai istilah daerah tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sifat malas, pemboros, atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada

suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah :

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem moderenisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism)* yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan dimana sektor industri lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan bekerja di sektor pertanian.

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun

pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati, 2005). Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah :

1) Tidak memiliki faktor produksi seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai
2) Tingkat pendidikan yang relatif rendah
3) Bekerja dalam lingkup kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga disebut juga setengah menganggur
4) Berada di kawasan perdesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan
5) Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Kemiskinan dalam penelitian ini diukur sesuai dengan rumus perhitungan tingkat kemiskinan menggunakan data yang diperoleh yaitu jumlah penduduk miskin sesuai dengan indikator BAPPENAS dan jumlah total penduduk. Adapun rumus tingkat kemiskinan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Total Penduduk}} \times 100\%$$

Sumber: Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik

2.2.2. Pendidikan

2.2.2.1. Definisi Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dalam arti luas berarti suatu proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup: pengetahuannya, nilai serta sikapnya, dan keterampilannya. Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Kegiatan tersebut, dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk mentrasformasikan nilai-nilai. Maka dalam penjelasannya ketiga kegiatan tersebut harus berjalan secara serempak dan terpadu, berkelanjutan, serta serasi dengan perkembangan anak didik serta lingkungan hidupnya.

2.2.2.2. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan suatu gambaran dari falsafah hidup atau pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok (bangsa dan negara).

Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di suatu masyarakat atau negara, menggambarkan pendidikan dalam suatu konteks yang sangat luas, menyangkut kehidupan seluruh umat manusia, yang digambakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik (Munib, 2010: 32).

Dalam pengertian yang khusus, pendidikan diartikan sebagai suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa

untuk mencapai kedewasaannya. Di sini jelas, bahwa yang menjadi tujuan pendidikan ialah kedewasaan.

Secara umum dapat dikemukakan beberapa indikator dari manusia dewasa, diantaranya :

1) Manusia yang mandiri, dapat hidup sendiri, mengambil keputusan sendiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain.
2) Bertanggung jawab kepada perbuatannya, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.
3) Telah mampu memahami norma-norma serta moral dalam kehidupan dan sekaligus berkesanggupan untuk melaksanakan norma serta moral tersebut, dalam hidup dan kehidupannya yang dimanifestasikan dalam kehidupan bersama.

2.2.2.3. Tujuan Pendidikan Dasar

Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dituntut peran guru dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peran guru dalam menyediakan dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna sangat dibutuhkan peserta didik sehinggga dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian dasar untuk menghindari kebodohan dan keterbelakangan.

2.2.2.4. Jalur dan Jenjang Pendidikan

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non formal, dan informal yang saling melengkapi.

1) Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jenjang pendidikan formal :

a. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS).

b. Pendidikan Menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas : Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), serta bentuk lain yang sederajat.

c. Pendidikan Tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, dan sebagainya.

2) Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan dengan terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal.

3) Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun informal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pendidikan dalam penelitian ini diukur melalui angka partisipasi sekolah pendidikan dasar dengan data yang diperoleh dari jumlah penduduk yang tamat pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan data jumlah total penduduk.

Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan angka partisipasi sekolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anak sekolah usia 7-15 tahun}}{\text{Jumlah total penduduk}} \times 100\%$$

Sumber: Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik

2.2.3. Pengangguran

2.2.3.1. Definisi Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama (Todaro, 2006: 441).

Pengangguran berarti permintaan global yang lebih rendah dan investasi modal manusia yang lebih rendah. sebagai konsekuensi dari erosi modal manusia, pengangguran jangka panjang kehilangan kualifikasi mereka sebagian atau seluruhnya, sementara keterampilan mereka menjadi usang pada masa kemajuan teknologi yang cepat (Nagel, 2015: 65).

2.2.3.2. Jenis-jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2013: 328-330), pengangguran dibedakan atas empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain :

1) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3% maka sudah dianggap mencapai kesempatan kerja penuh. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh suatu pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik.
2) Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran tenaga kerja.
3) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga beberapa kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan.
4) Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri.

Sedangkan bentuk-bentuk pengangguran berdasarkan cirinya dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Pengangguran musiman, adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, petani yang menanti musim tanam, pedagang durian yang menanti musim durian, dan sebagainya.
2) Pengangguran terbuka, pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pencari kerja.
3) Pengangguran tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.
4) Setengah menganggur, yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari). Disebut *underemployment*.

Pengangguran dalam penelitian ini diukur melalui rumus perhitungan tingkat pengangguran terbuka. Menggunakan data jumlah pengangguran yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 2 indikator yaitu : mencari pekerjaan dan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta data jumlah penduduk. Adapun rumus perhitungan tingkat pengangguran terbuka sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Total Penduduk}} \times 100\%$$

Sumber: Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti berpijak pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang peneliti anggap relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian yang relevan, yaitu penelitian yang telah ada dan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat dijadikan acuan dan pendukung dalam sebuah penelitian yang baru. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan.

Tabel 3.1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Hasil
1.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Adit Agus Prasetyo (2010)	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, pengangguran	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan
2.	*The Global Economic Crisis, Poverty, and Education: a Perspective from India.* Nambissan (2010)	Pendidikan	Pendidikan di India telah gagal mengatasi konteks sosial kehidupan anak-anak miskin dan memperlengkapi guru dengan perspektif dan kapasitas profesional untuk mengatasi beragam kebutuhan belajar. Hal tersebut membuat parlemen

			India mengesahkan RUU yang menjamin semua anak-anak berhak atas pendidikan dasar
3.	*Perceived Impact of Education on Poverty Reduction in Rural Areas of Iran.* Aref (2011)	Pendidikan	Sistem pendidikan di wilayah perdesaan merupakan penyebab masalah kemiskinan di Iran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : kurangnya sumber daya dan kurikulum pendidikan, kompetensi guru rendah, kurangnya akses ke sekolah menengah bagi masyarakat perdesaan, kurangnya partisipasi orang-orang yang berpendidikan di wilayah perdesaan sebagai proses pengentasan kemiskinan
4.	*The Effects of Poverty on Academic Achievement.* Lacour (2011)	Status sosial ekonomi dan prestasi akademik	Kemiskinan membentuk budaya dan cara hidup tertentu, merupakan masalah yang berkembang di Amerika Serikat. Jumlah orang Amerika yang hidup dalam kemiskinan terus meningkat. Kemiskinan secara langsung mempengaruhi prestasi akademik karena kurangnya

			sumber daya yang tersedia untuk keberhasilan siswa. Prestasi rendah berkorelasi erat dengan kurangnya sumber daya. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara status sosial ekonomi rendah dan prestasi rendah
5.	Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural. Tri Wahyu Rejekiningsih (2011)	-	Ciri-ciri warga miskin di Kota Semarang: kepala rumah tangga berpendidikan rendah, ketidakmerataan dalam distribusi bantuan kepada warga miskin, warga miskin memiliki orientasi nilai budaya dan sikap mental yang positif dalam memandang hakekat hidup.
6.	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Arius Jonnadi (2012)	Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan investasi	Pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan tetapi pengangguran berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan
7.	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan	Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan	Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan pertumbuhan

	Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Mirza (2012)	belanja modal	ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah
8.	Analisis Eksistensi Sektor Pertanian Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan. Hermawan (2012)	-	Sektor pertanian berperan penting terhadap upaya pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Sedangkan di wilayah perkotaan industri pengolahan berperan penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.
9.	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Yacoub (2012)	Pengangguran	Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan

10.	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. Durrotul Mahsunah (2013)	Jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur	Jumlah penduduk dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan
11.	*Association Between Sustained Poverty and Changes in Body Mass Index, 1990-2015.* Elfassy (2015)	Jenis kelamin dan pendidikan.	Usia rata-rata pada awal tahun 1990 adalah 30 tahun, 54,9% adalah perempuan, dan 50,6% berkulit hitam. Kemiskinan yang di alami oleh penduduk Amerika antara tahun 1990 dan 2015 lebih cenderung dialami oleh perempuan yang berkulit hitam karena memiliki rata-rata pendidikan yang lebih rendah yang disebabkan oleh pendidikan orang tua mereka juga rendah
12.	Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.	Pengangguran, PDRB, populasi	Pengangguran, PDRB, dan populasi signifikan terhadap tingkat kemiskinan

	Puspita (2015)		
13.	Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi. Nopriansyah, Junaidi, Etik Umiyati (2015)	Klasifikasi desa/kelurahan, jenis kelamin kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah anggota dan bantuan kredit usaha	Klasifikasi desa/kelurahan, jenis kelamin kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah anggota dan bantuan kredit usaha berpengaruh positif terhadap kemiskinan rumah tangga di Provinsi Jambi
14.	Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali. Wirawan (2015)	Analisis pengaruh pendidikan, PDRB perkapita, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali	Pendidikan dan PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin
15.	Analisis PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat	PDRB, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran	PDRB dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap

	Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013. Sari (2016)		kemiskinan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, memperkuat dugaan bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.

2.4. Kerangka Berpikir

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan pangan. Kemiskinan terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi, jika dikaitkan dengan teori lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse (1953) kemiskinan terjadi karena adanya keterbelakangan dan ketertinggalan sumber daya manusia (yang tercermin oleh tingkat pendidikan yang rendah), ketidaksempurnaann pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya jumlah pengangguran). Tingkat pendidikan di Kabupaten Wonosobo berada pada kategori tinggi dan tingkat pengangguran terbuka berada

pada kategori sedang, tetapi kedua faktor tersebut tidak mengubah predikat Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah.

Berdasarkan teori tersebut maka dapat diketahui bahwa faktor pendidikan dan pengangguran menjadi faktor utama penyebab adanya kemiskinan. Hal ini diperkuat melalui penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain : Pertama, hasil penelitian Elfassy (2015: 1242-1243) menjelaskan bahwa Kemiskinan yang di alami oleh penduduk Amerika antara tahun 1990 dan 2015 lebih cenderung dialami oleh perempuan yang berkulit hitam karena memiliki rata-rata pendidikan yang lebih rendah yang disebabkan oleh pendidikan orang tua mereka juga rendah. Kedua, hasil penelitian Irhamni (2017: 76-77) menjelaskan bahwa variabel jumlah penduduk, dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka perlu diketahui hubungan antara pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Seseorang yang memperoleh pendidikan yang lebih tinggi maka akan memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan standar hidupnya.

Pengangguran adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Hubungan pengangguran dengan kemiskinan sangat erat karena jika seseorang sudah bekerja maka orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memiliki kesejahteraan tinggi. Apabila seseorang

belum bekerja atau menganggur, maka orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menyebabkan kesejahteraan rendah yang secara otomatis dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan di negara berkembang seperti di Indonesia juga dipengaruhi faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau perdesaan akan sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 275 meter sampai 2.250 meter di atas permukaan laut, sehingga menyebabkan jarak antar kecamatan menuju ibukota kabupaten cukup jauh. Wilayah kecamatan perkotaan di Kabupaten Wonosobo terdiri atas 10 kecamatan dan wilayah kecamatan perdesaan terdiri atas 5 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Penentuan perkotaan dan perdesaan tersebut berdasarkan teori aglomerasi yang dikemukakan oleh Kuncoro (2002) yang berisi bahwa konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan yang di asosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen (Zuliastri, 2013: 116). Skema hubungan antara pendidikan, pengangguran, dan lokasi terhadap kemiskinan sebagai berikut:

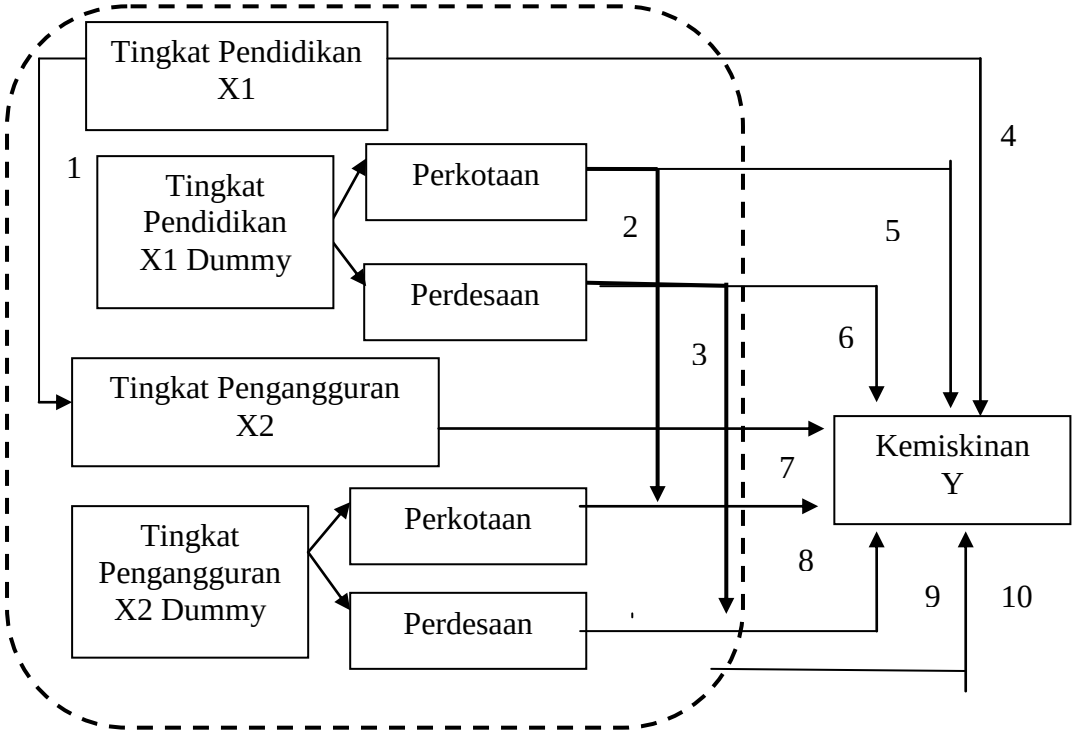

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

Keterangan :

→ = pengaruh secara parsial

- - - - = pengaruh secara simultan

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian yang masih perlu diuji dan dibuktikan secara empiris tingkat kebenarannya dengan menggunakan data-data yang berhubungan. Berdasarkan landasan teori di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Tingkat pendidikan dasar berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo.

H2 : Tingkat pendidikan dasar di perkotaan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di perkotaan di Kabupaten Wonosobo.

H3 : Tingkat pendidikan dasar di perdesaan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di perdesaan di Kabupaten Wonosobo.

H4 : Tingkat pendidikan dasar berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

H5 : Tingkat pendidikan dasar di perkotaan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

H6 : Tingkat pendidikan dasar di perdesaan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

H7 : Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

H8 : Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

H9 : Tingkat pengangguran terbuka di perdesaan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

H10 : Tingkat pendidikan, tingkat pendidikan dasar di perkotaan, tingkat pendidikan dasar di perdesaan, tingkat pengangguran, tingkat pengangguran di perkotaan, dan tingkat pengangguran di perdesaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo menggunakan regresi linear berganda dan asumsi klasik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan dasar di perkotaan, dan tingkat pendidikan dasar di perdesaan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan, dan tingkat pengangguran terbuka di perdesaan. Seseorang yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi maka akan memperoleh kesempatan lebih baik untuk meningkatkan standar hidupnya. Tingkat Pendidikan di Kabupaten Wonosobo yang diukur menggunakan perhitungan Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 tahun yaitu di tingkat SD dan SMP belum mampu mengatasi kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Hal ini disebabkan kurangnya keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh individu lulusan SD dan SMP untuk menyesuaikan permintaan dunia kerja maka perlu ditingkatkan pendidikannya pada pendidikan menengah yaitu ditingkat SMA sederajat.
2. Variabel tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan dasar di perdesaan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Wonosobo telah tamat

pendidikan dasar sebesar 60,51%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan di Kabupaten Wonosobo tergolong tinggi. Seseorang yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi maka akan memperoleh kesempatan lebih baik untuk meningkatkan standar hidupnya. Pengaruh pendidikan tidak hanya mempengaruhi perilaku karena pendidikan dapat mengubah seseorang menjadi lebih dewasa sehingga mampu mengambil keputusan yang dapat meningkatkan keinginan untuk mengubah hidupnya menjadi seseorang yang lebih sukses.

3. Variabel tingkat pendidikan dasar di perkotaan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Hal ini disebabkan karena masyarakat kota memiliki pendidikan minimal SMA sederajat, selain itu jumlah pengangguran juga lebih banyak terdapat di perkotaan, sehingga dengan adanya pendidikan di perkotaan penduduk miskin akan semakin bertambah karena beban yang di tanggung keluarga juga semakin bertambah terutama untuk berinvestasi di bidang pendidikan.
4. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Hal ini disebabkan karena tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun semakin menurun, terutama pada tahun 2017 sebesar 4,18%. Angka tersebut merupakan tingkat pengangguran terbuka terendah sepanjang tahun 2011. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa 95,82% masyarakat Kabupaten Wonosobo telah memiliki pekerjaan baik di sektor formal

maupun sektor informal. Hubungan pengangguran dengan kemiskinan sangat erat karena jika seseorang sudah bekerja maka orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memiliki kesejahteraan tinggi.

5. Variabel tingkat pengangguran terbuka di perkotaan dan tingkat pengangguran terbuka di perdesaan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Hal ini disebabkan karena orang yang masuk dalam kategori pengangguran belum tentu tergolong orang yang miskin jika di dalam rumah tangganya terdapat anggota keluarga yang bekerja dengan pendapatan yang tinggi sehingga akan cukup untuk menyokong penganggur. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, penganggur yang ada dalam rumah tangga tersebut tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan keluarganya hidup berada di atas garis kemiskinan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran dalam upaya untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu untuk membantu mengatasi masalah pendidikan. Kecamatan Garung merupakan kecamatan dengan tingkat pendidikan dasar terendah di Kabupaten Wonosobo, maka pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat pendidikan dasar di Kecamatan Garung melalui pemberian beasiswa kepada masyarakat miskin

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah, mengingat pemerintah Indonesia telah mencanangkan upaya pendidikan wajib belajar 12 tahun.

2. Pemerintah daerah perlu membantu mengatasi pengangguran, khususnya pengangguran di perkotaan karena jumlah pengangguran di perkotaan lebih besar daripada jumlah pengangguran di perdesaan. Kemiskinan di perkotaan disebabkan karena kurangnya jumah lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup dan layak terutama bagi golongan masyarakat menengah ke bawah supaya golongan tersebut dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
3. Penelitian ini hanya mengambil variabel tingkat pengangguran terbuka sehingga belum dapat menjangkau seluruh jenis pengangguran khususnya pengangguran musiman yang terlibat dalam klasifikasi suatu wilayah, bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel yang lebih bervariasi sehingga kemiskinan dapat dilihat dari faktor ekonomi maupun non ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, F. (2012). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010*. *Jurnal Ilmiah Econosains*, *10*(2), 158-169. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Aref, A. (2011). *Perceived impact of education on poverty reduction in rural areas of Iran*. *Life Science Journal*, *8*(2), 498-501

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Bappenas. (2010). *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin*. Jakarta.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo. (2018). *Jumlah Lulusan SD Sederajat dan SMP Sederajat Tahun 2017/2018.* Wonosobo: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. (2018). *Tingkat Pengangguran Terbuka.* Wonosobo: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.

Elfassy, T., Glymour, M. M., Kershaw, K. N., Carnethon, M., Llabre, M. M., Lewis, C. E., ... & Zeki Al Hazzouri, A. (2017). *Association Between Sustained Poverty and Changes in Body Mass Index, 1990–2015: The Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study*. *American journal of epidemiology*, *187*(6), 1240-1249.

Gujarati, Damodar N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

Hermawan, I. (2012). *Analisis eksistensi sektor pertanian terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan*. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, *28*(2), 135-144. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Irhamni. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY.

Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H. (2012). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, *1*(1). Padang: Universitas Negeri Padang.

Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisis Keempat.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

_____. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis.* Jakarta: Erlangga.

Lacour, M., & Tissington, L. D. (2011). *The effects of poverty on academic achievement*. *Educational Research and Reviews*, *6*(7), 522-527.

Mahsunah, D. (2013). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *1*(3). Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Mayo, A. (2000). *The role of employee development in the growth of intellectual capital*. *Personnel Review*, *29*(4), 521-533.

Mirza, D. S. (2012). *Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009*. *Economics Development Analysis Journal*, *1*(2). Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Munib, Achmad. (2010). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT UNNES Press.

Nagel, K. (2015). *Relationships between unemployment and economic growth–the review (results) of the theoretical and empirical research*. *Journal of Economics & Management*, *20*, 64-79.

Nambissan, G. B. (2010). *The global economic crisis, poverty and education: a perspective from India. Journal of Education policy*, *25*(6), 729-737.

Nopriansyah, N., Junaidi, J., & Umiyati, E. (2015). *Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, *2*(3), 119-128. Jambi: Universitas Jambi.

Ongkorahardjo, M. D. P. A., Susanto, A., & Rachmawati, D. (2009). *Analisis Pengaruh Human Capital Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *10*(1), 11-21.

Prastyo, A. A., YUSUF, E., & Yusuf, E. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di*

Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Puspita, D. W. (2015). *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, *8*(1). Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Rejekiningsih, T. W. (2011). *Identifikasi faktor penyebab kemiskinan di kota Semarang dari dimensi kultural*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *12*(1), 28-44. Semarang: Universitas Diponegoro.

Rumahorbo, Restuty Anggereny. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sari, S.P., Anwar, D. D., & Darussamin, D. D. (2016). *Analisis PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013. I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 2 (1), 86-101.

Statistik, B. P. (2017). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota. *Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat*.

_____. (2018). Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2018. *BPS Kabupaten Wonosobo.*

_____. (2018). Jawa Tengah dalam angka. *BPS Provinsi Jawa Tengah*.

Sudjana, N. Ibrahim. (2014). *Penelitian dan penilaian pendidikan*. Semarang: Sinar Baru Algensindo

Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryawati, C. (2005). *Memahami kemiskinan secara multidimensional*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, *8*(03). Semarang: Universitas Diponegoro.

Todaro, Michael P dan Stephen C.S. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan. Jakarta: Diperbanyak oleh PT Armas Duta Jaya.

Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional. Jakarta: Diperbanyak oleh PT Armas Duta Jaya.

Wahyudi, D., & Rejekingsih, T. W. (2013). *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*. *Diponegoro Journal of Economics*, *2*(1), 83-97. Semarang: Universitas Diponegoro.

Wijayanti, D., & Wahono, H. (2005). *Analisis Konsentrasi Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 1999-2003. Economic Journal of Emerging Markets*, *10*(3). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Wirawan, I. M. T., & Arka, S. (2015). *Analisis pengaruh pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin provinsi Bali*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, *4*(5). Bali: Universitas Udayana.

Wonosobozone. (2017). *Angka Nikah Dini Wonosobo Duduki Peringkat Kedua Tertinggi di Jateng.* Diunduh pada 18 Februari 2019. https://www.wonosobozone.com/angka-nikah-dini-wonosobo-duduki-peringkat-kedua-tertiggi-di-jateng-2/

World Bank. 2006. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Diunduh pada 15 Januari 2019. http://www.worldbank.org

Yacoub, Y. (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. *Untan Journal of Economics*, *8*(3), 176-185. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Zuliastri, F., Rindayati, W., & Asmara, A. (2013). *Analisis Faktor yang Memengaruhi Aglomerasi Industri Unggulan Daerah dan Hubungannya dengan Daya Saing Industri Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, *2*(2). Bogor: Institut Pertanian Bogor.